

Pelatihan Kecakapan Berbasis Kompetensi Mengenai Resolusi Konflik Keagamaan pada Mahasiswa Studi Agama-Agama

Suprpto | Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Email korespondensi: suprpto@unim.ac.id

Abstrak

Abstrak: Konflik keagamaan masih menjadi tantangan sosial dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Mahasiswa program studi Agama-Agama sebagai calon pemimpin dan pendidik agama memiliki peran dalam membangun kohesi sosial, namun masih menghadapi kesenjangan antara pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam menangani konflik berbasis agama. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kecakapan berbasis kompetensi dalam resolusi konflik keagamaan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan meliputi pelatihan intensif berbasis teori konflik dan pendekatan partisipatif, serta magang selama dua minggu di lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di empat wilayah di Provinsi Lampung. Sebanyak 39 mahasiswa terlibat dalam identifikasi konflik, pengembangan program resolusi, fasilitasi dialog, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kontekstual, keterampilan fasilitasi, serta kemampuan menyusun intervensi berbasis analisis sosial-keagamaan. Program ini menjadi model pembelajaran integratif yang menyelaraskan pengetahuan akademik dan praktik sosial dalam membentuk kapasitas mediator resolusi konflik.

Kata kunci: resolusi konflik, keagamaan, mahasiswa, pelatihan berbasis kompetensi, FKUB

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya. Di tengah pluralitas tersebut, ketegangan sosial yang berakar dari perbedaan agama kerap menjadi tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik keagamaan yang terjadi di beberapa wilayah seperti Poso, Ambon, dan beberapa kota lainnya, menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama masih rentan terhadap gesekan sosial, terutama ketika dipicu oleh intoleransi atau provokasi berbasis identitas keagamaan (Rahmelia, 2021; Suprpto, 2018).

Kondisi ini menjadi perhatian khusus dalam konteks pendidikan tinggi, terutama di lingkungan mahasiswa yang mempelajari studi agama-agama. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang diharapkan mampu memainkan peran strategis sebagai agen perdamaian dan jembatan antarumat beragama. Namun demikian, penguasaan teori keagamaan yang diperoleh di bangku kuliah belum tentu sejalan dengan kecakapan praktis dalam mengelola konflik berbasis agama. Kesenjangan ini menjadi hambatan dalam menyiapkan generasi yang responsif terhadap tantangan sosial berbasis keberagaman (Sutrisno, 2019).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan resolusi konflik yang kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai multikultural dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dalam menghadapi situasi konflik (Pedersen, 2016). Dalam hal ini, pengembangan

kapasitas melalui pelatihan berbasis kompetensi menjadi sangat penting, terutama yang mencakup kemampuan identifikasi konflik, penilaian dampak, penyusunan strategi resolusi, hingga kemampuan mediasi dan negosiasi (Sulistyaningsih et al., 2020; Suprpto et al., 2021; Suprpto, 2022). Tanpa pendekatan praktis semacam ini, mahasiswa rentan terjebak pada wacana normatif tanpa kemampuan intervensi yang nyata.

Pelatihan berbasis kompetensi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai perdamaian. Dengan pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk memahami akar konflik secara mendalam dan mengembangkan keterampilan resolutif yang sesuai dengan konteks lokal. Lebih jauh, pelatihan ini juga menanamkan sikap reflektif dan empatik terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan maupun keyakinan (Girivirya et al., 2022).

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa konflik yang tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat dapat bereskalasi menjadi kekerasan terbuka (Fisher, 2001). Oleh karena itu, keterampilan resolusi konflik yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi krusial, terutama dalam upaya mencegah konflik sejak dini melalui deteksi dan penanganan yang berbasis dialog. Hal ini sejalan dengan pentingnya pendekatan partisipatif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (Faiqah & Pransiska, 2018).

Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis konflik sangat dibutuhkan sebagai kontribusi intelektual terhadap upaya pencegahan jangka panjang. Pendekatan ini memperluas peran mahasiswa bukan hanya sebagai penyelesai konflik, tetapi juga sebagai perancang kebijakan yang sensitif terhadap dinamika sosial-keagamaan di masyarakat (Joseph S. Nye, 2004). Dengan demikian, pelatihan semacam ini dapat menjadi sarana strategis dalam membangun kapasitas generasi muda yang sadar sikap-sikap moderat.

Berdasarkan latar belakang ini, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan kecakapan berbasis kompetensi mengenai resolusi konflik keagamaan kepada mahasiswa program studi Agama-Agama. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami dinamika konflik keagamaan secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mencegah, menangani, dan mendokumentasikan proses penyelesaian konflik di masyarakat.

Metode

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi dengan model partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Pelatihan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun strategi resolusi konflik keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan kebutuhan penguatan kapasitas mahasiswa sebagai calon aktor perdamaian yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara kontekstual dalam situasi nyata.

Metode pelatihan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yakni: identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan modul berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), pelaksanaan pelatihan secara intensif, simulasi penyelesaian konflik, hingga evaluasi dan monitoring pasca pelatihan. Setiap sesi pelatihan mencakup elemen kompetensi seperti identifikasi konflik, penilaian dampak, penyusunan strategi resolusi, implementasi, mediasi-negosiasi, evaluasi program, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pelaporan. Metode penyampaian menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, role play, dan simulasi.

Peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang dipilih berdasarkan ketertarikan dan keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial-keagamaan. Lokasi pelaksanaan kegiatan bertempat

di UIN Raden Intan Lampung dan forum lintas iman seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang mendukung pengalaman kontekstual mahasiswa dalam memahami dinamika lintas agama. Evaluasi efektivitas program dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test, umpan balik peserta, serta observasi keterlibatan selama pelatihan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi lanjutan yang relevan bagi pengembangan program serupa di masa depan.

Hasil

Pelatihan kecakapan berbasis kompetensi dalam resolusi konflik keagamaan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis dan analitis dalam memahami dinamika konflik berbasis agama. Pelatihan berlangsung selama satu minggu dan dilanjutkan dengan kegiatan magang selama dua minggu pada lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di empat wilayah di Provinsi Lampung.

Tahap pertama pelatihan difokuskan pada kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik keagamaan, yang meliputi pengumpulan informasi awal tentang konflik dan identifikasi aktor-aktor yang terlibat. Mahasiswa dilatih menggunakan instrumen identifikasi konflik yang berisi panduan sistematis, mulai dari pihak yang terlibat, akar konflik, hingga dinamika eskalasi konflik.

Dalam sesi ini, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai bentuk konflik yang bersifat laten maupun terbuka, serta bagaimana narasi identitas keagamaan dapat memperkuat atau bahkan memicu ketegangan sosial. Diskusi kasus-kasus lokal dan nasional dijadikan sebagai bahan praktik identifikasi pola konflik.

Mahasiswa juga diajak untuk mengenali bagaimana pihak ketiga atau penonton (*bystander*) kadang berperan dalam memperuncing atau meredakan konflik. Kemampuan ini penting agar mahasiswa dapat memahami konflik sebagai sistem sosial yang kompleks, bukan sekadar persoalan antarindividu.

Tahap selanjutnya adalah mengembangkan program resolusi konflik keagamaan. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kerja dan diminta untuk merancang program resolusi yang bersifat inklusif, berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya. Mereka belajar menyusun rencana yang mencakup kegiatan dialog, edukasi publik, serta strategi mencegah eskalasi konflik.

Salah satu aspek penting dalam tahap ini adalah kemampuan merancang program yang memperhatikan sensitivitas budaya dan konteks lokal. Mahasiswa dilatih untuk menyusun program yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan aplikatif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Setelah merancang program, mahasiswa diajak untuk mensimulasikan implementasi program resolusi. Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan metode seperti role-play, pemetaan aktor, dan simulasi mediasi konflik. Proses ini memperkuat keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi, mengambil posisi netral, dan menciptakan ruang negosiasi yang konstruktif.

Bagian berikutnya dari pelatihan adalah memfasilitasi dialog antaragama. Mahasiswa belajar cara mengorganisir sesi dialog, menyusun agenda, menetapkan aturan main, serta memoderasi diskusi lintas iman. Mereka juga diperkenalkan pada teknik fasilitasi seperti *active listening* dan *non-violent communication*.

Dalam sesi ini, mahasiswa didorong untuk menciptakan ruang dialog yang setara dan aman bagi seluruh pihak. Mereka juga dilatih untuk mendeteksi ketegangan selama dialog berlangsung, serta merespons dengan pendekatan restoratif yang mengedepankan empati dan keadilan.

Setelah mengikuti pelatihan, sebanyak 39 mahasiswa kemudian diterjunkan untuk magang di empat wilayah: FKUB Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran. Mahasiswa terbagi ke dalam empat kelompok dan melaksanakan tugas berbasis instrumen rekonsiliasi konflik yang telah disiapkan.

Selama dua minggu, mahasiswa melakukan asesmen kebutuhan, penggalian data, dan analisis konflik berdasarkan variabel yang terdapat dalam instrumen: identifikasi pihak konflik, akar masalah, dampak, dinamika, kesiapan rekonsiliasi, dan peran pihak ketiga. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Di Bandar Lampung, kelompok mahasiswa menemukan bahwa konflik antarumat keagamaan cenderung bersifat laten dan dipengaruhi oleh misinformasi di media sosial. Oleh karenanya, mahasiswa mendialogkan hal-hal seputar: 1. Dialog Antarumat Beragama, 2. Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah, 3. Mediasi Konflik Keagamaan, 4. Sosialisasi Nilai-nilai Keagamaan, dan 5. Koordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat. Lima aspek ini dirasa penting untuk dikoordinasi antar lembaga keagamaan bersama FKUB. Sementara di Kabupaten Pringsewu, kegiatan bersama FKUB meliputi:

1. Mengelola dialog lintas agama untuk mencegah dan menangani potensi konflik.
2. Menyediakan forum untuk mediasi jika terjadi ketegangan antarumat beragama.
3. Edukasi dan sosialisasi toleransi (menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan diskusi terkait pentingnya toleransi dan kerukunan).
4. Memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kebhinekaan, khususnya kepada generasi muda.
5. Pengembangan desa sadar kerukunan (meluncurkan program desa sadar kerukunan, seperti di desa waringin sari timur, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis)
6. Mengembangkan inisiatif saung kerukunan umat beragama sebagai tempat diskusi dan pembinaan kerukunan di tingkat kecamatan.

Mahasiswa di Lampung Selatan mengamati bahwa konflik yang pernah terjadi berakar pada perbedaan pandangan teologis dan praktik keagamaan yang eksklusif. Namun, mereka juga menemukan potensi kuat untuk rekonsiliasi, terutama karena peran aktif tokoh agama lokal dalam memediasi konflik. Informasi yang mereka sampaikan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan bersama siswa SMA dan dialog bersama untuk membekali dan mengantisipasi adanya potensi konflik keagamaan.

Di Kabupaten Pesawaran, mahasiswa mencatat bahwa keterlibatan pemuda dan tokoh masyarakat dalam forum dialog melalui mediasi konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya inklusivitas dalam program resolusi konflik keagamaan. Kelompok ini kemudian mengusulkan model partisipatif berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan sosial.

Selama kegiatan magang, mahasiswa juga diminta untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas sesi dialog yang dilakukan oleh FKUB setempat. Mereka mencatat bahwa keberhasilan dialog sangat bergantung pada kepercayaan antar pihak dan keterbukaan dalam menyampaikan pandangan.

Selain itu, mahasiswa juga menemukan bahwa simbol-simbol perdamaian seperti kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial mampu meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama. Langkah-langkah simbolik ini, jika dikembangkan secara konsisten, dapat memperkuat proses rekonsiliasi jangka panjang.

Hasil magang menunjukkan bahwa pelatihan yang mereka ikuti sebelumnya sangat membantu dalam memahami mediasi konflik serta dalam menyusun rekomendasi berbasis temuan lapangan. Mahasiswa berhasil menyusun laporan analisis konflik dan menyampaikan rekomendasi program kepada pihak FKUB.

Rekomendasi tersebut antara lain mencakup pentingnya pelatihan fasilitator lokal, penguatan literasi media keagamaan, serta pembentukan forum dialog yang melibatkan generasi muda dan kelompok minoritas agama. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan program kerja FKUB di masa mendatang.

Secara umum, program ini menunjukkan bahwa integrasi antara pelatihan berbasis kompetensi dan magang lapangan dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi

isu-isu konflik keagamaan secara lebih komprehensif. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis agama.

Sebanyak 39 mahasiswa terbagi ke dalam empat kelompok yang tersebar ke empat wilayah FKUB. Tabel di atas menunjukkan distribusi mahasiswa, lokasi FKUB, serta fokus permasalahan utama yang ditemukan masing-masing kelompok. Data ini memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas dan keragaman konteks konflik keagamaan di wilayah Provinsi Lampung. Pemilahan ini mempermudah pengembangan pendekatan resolusi yang disesuaikan dengan karakter lokal.

Pelatihan → Identifikasi Konflik → Pengembangan Program → Simulasi Resolusi

↓ ↓ ↓
Magang → Asesmen Kebutuhan → Dialog & Observasi → Evaluasi & Rekomendasi

Skema di atas memperlihatkan alur peningkatan kompetensi mahasiswa dari fase pelatihan hingga praktik magang. Mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritik, tetapi secara sistematis menjalani siklus kerja lapangan yang mencakup asesmen, pengembangan program resolusi, serta evaluasi berbasis pengalaman langsung. Pendekatan ini berbasis pada prinsip *experiential learning* yang diyakini lebih efektif dalam pembentukan kompetensi praktis.

Temuan ini juga menegaskan bahwa pelatihan resolusi konflik yang baik harus dikaitkan dengan pengalaman nyata di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa berlatih membangun kesadaran kritis, memperkuat keterampilan dialogis, dan mengembangkan sensitivitas terhadap konteks sosial-keagamaan. Berikut ini tersaji bagan kategori temuan berdasarkan instrumen rekonsiliasi yang diidentifikasi berdasarkan asesmen kebutuhan, gejala konflik, dan penyelesaian konflik dilakukan.

A [Identifikasi Konflik] --> B (Akar Konflik)

A --> C (Pihak Terlibat)

A --> D (Dampak Konflik)

D --> D1 (Sosial)

D --> D2 (Psikologis)

D --> D3 (Ekonomi)

A --> E (Dinamika Konflik)

B --> B1 (Perbedaan agama)

B --> B2 (Kesenjangan informasi)

B --> B3 (Eksklusivisme)

E --> E1 (Eskalasi)

E --> E2 (De-eskalasi)

Bagan ini menggambarkan struktur kategorisasi temuan lapangan berdasarkan instrumen rekonsiliasi konflik yang digunakan mahasiswa. Dari identifikasi aktor dan akar konflik, hingga dampak yang muncul dan dinamika interaksi konflik, bagan ini menunjukkan bagaimana mahasiswa melakukan pemetaan sistematis terhadap konflik yang terjadi. Hasil ini selanjutnya menjadi dasar dalam merancang intervensi yang berbasis data lapangan dan partisipatif.

Pembahasan

Pelatihan kecakapan berbasis kompetensi yang dilaksanakan dalam program ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya memerlukan pengetahuan normatif mengenai konflik keagamaan, tetapi juga kerangka analisis yang memadai untuk memahami realitas sosial.

Materi pelatihan yang mencakup teori-teori penyebab konflik seperti teori hubungan masyarakat, teori kebutuhan manusia, teori identitas, serta teori kesalahpahaman antarbudaya (Fisher et al., 2001), telah menjadi landasan dalam membentuk perspektif mahasiswa terhadap akar konflik keagamaan yang mereka temui di lapangan.

Dalam praktiknya, mahasiswa menerapkan pendekatan multi-teoritis ini saat melakukan asesmen konflik di empat wilayah FKUB. Misalnya, kelompok di Lampung Selatan mengamati bahwa eksklusivisme teologis menjadi akar ketegangan antarumat. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam materi bahwa perbedaan doktrin dan sikap mental merupakan salah satu sumber utama konflik keagamaan (Natalia, 2018). Dengan demikian, pendekatan identitas menjadi relevan untuk memahami dinamika yang terjadi.

Lebih jauh, mahasiswa juga mengkonfirmasi bahwa konflik keagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor struktural seperti ketimpangan sosial, akses informasi, dan representasi media. Temuan ini menguatkan pendekatan transformasi konflik yang dijelaskan dalam materi pelatihan, bahwa konflik perlu dilihat sebagai bagian dari ketidaksetaraan sosial, budaya, dan ekonomi yang mengakar (Fisher et al., 2001).

Terkait dengan pendekatan institusional, pelatihan telah mengenalkan pada mahasiswa konsep kognitif-budaya, regulatif, dan normatif sebagaimana dipaparkan oleh Scott, (2008). Mahasiswa mengamati bagaimana struktur dan norma kelembagaan FKUB dapat mempengaruhi pola interaksi antarumat. Di Kabupaten Pesawaran, misalnya, keterlibatan pemuda dan tokoh masyarakat dalam forum dialog melalui mediasi konflik melalui forum dialog.

Pentingnya komunikasi antar kelompok juga ditekankan dalam pelatihan, termasuk bahaya stereotip, miskomunikasi, dan minimnya empati. Dalam praktik magang, mahasiswa mencoba memfasilitasi sesi diskusi di lingkungan FKUB dengan meminimalkan bias dan mempraktikkan teknik mendengarkan aktif (*active listening*) dan klarifikasi. Pendekatan ini dirasa efektif menciptakan ruang dialog yang lebih setara dan partisipatif.

Ketika mahasiswa menyusun program resolusi konflik, mereka menggunakan prinsip kolaboratif, mediasi, dan kompromi sebagaimana dijelaskan dalam materi teknik negosiasi konflik keagamaan. Mahasiswa dilatih untuk memahami bahwa penyelesaian konflik tidak bersifat absolut, tetapi merupakan proses bertahap yang menuntut keterbukaan dan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan di lapangan, mahasiswa menggunakan teknik *reframing* dan *summarizing* untuk menghindari kebuntuan dialog.

Program yang dikembangkan oleh mahasiswa umumnya diarahkan pada pembentukan ruang dialog berkelanjutan, kampanye toleransi lintas iman, serta keterlibatan tokoh agama dalam edukasi sikap moderat. Pendekatan ini menguatkan peran transformasional FKUB dalam membentuk struktur sosial terhadap keberagaman.

Dalam refleksi hasil magang, mahasiswa mengidentifikasi adanya ketegangan emosional dan ketidakpercayaan antarumat di beberapa wilayah. Mereka kemudian menyarankan perlunya pelibatan pihak ketiga sebagai mediator yang netral dan dipercaya oleh semua pihak. Ini sejalan dengan skema mediasi konflik keagamaan dalam materi pelatihan, yang menempatkan mediator sebagai aktor penting dalam meredakan ketegangan dan membuka ruang solusi.

Di sisi lain, mahasiswa menyadari bahwa pendekatan penyelesaian konflik harus disertai dengan tindakan simbolik. Dalam materi pelatihan disebutkan pentingnya upacara, pertemuan, atau kegiatan bersama sebagai bentuk komitmen terhadap sikap moderat. Beberapa kelompok magang bahkan menginisiasi program dialog yang mempertemukan tokoh agama dalam suasana informal.

Pembelajaran penting lainnya adalah bahwa mahasiswa menyadari batas-batas dari intervensi berbasis normatif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan berbasis regulasi formal kadang tidak efektif tanpa dukungan budaya dan kepercayaan lokal. Hal ini menunjukkan dialog efektif melalui pendekatan kultural dalam mengelola konflik berbasis agama.

Dari sisi penguatan kapasitas, mahasiswa menilai bahwa pelatihan berbasis kompetensi lebih efektif dibanding sekadar pemberian materi teoritis. Praktik langsung di lapangan memberikan mereka pengalaman mengelola konflik nyata dan menghadapi ketegangan sosial secara langsung. Hal ini sebagai bekal penunjang kompetensi mereka dalam bidang studi agama-agama yang selama ini lebih banyak bertumpu pada kajian tekstual.

Hasil dari pembelajaran ini juga memperlihatkan potensi pengembangan kurikulum studi agama-agama agar lebih mengakomodasi aspek resolusi konflik sebagai mata kuliah praktik. Mahasiswa merasa lebih terhubung dengan realitas sosial dan termotivasi untuk mengembangkan dialog-dialog berbasis komunitas.

Program magang di FKUB menjadi salah satu cerminan bahwa pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning*) dapat mengubah paradigma mahasiswa dari posisi pasif sebagai penerima pengetahuan menjadi pelibatan aktif dalam membangun kohesi sosial. Mereka selain belajar tentang konflik, juga membentuk sikap reflektif dan empatik.

Di akhir program, mahasiswa menyusun laporan evaluatif dan ujian kompetensi berdasarkan pedoman monitoring dan refleksi sebagaimana tercantum dalam instrumen pelatihan. Refleksi ini mencakup pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak, analisis dampak sosial, dan rekomendasi tindak lanjut.

Simpulan

Pelatihan kecakapan berbasis kompetensi dalam resolusi konflik keagamaan bagi mahasiswa Program Studi Agama-Agama telah menunjukkan hasil dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Melalui pendekatan berbasis teori konflik dan praktik lapangan, mahasiswa memperoleh pemahaman kontekstual mengenai dinamika konflik keagamaan di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

Pelatihan ini menekankan pentingnya identifikasi aktor, akar konflik, serta dampak sosial yang ditimbulkan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui perancangan program resolusi yang inklusif. Implementasi program dilengkapi dengan teknik fasilitasi dialog antaragama yang partisipatif. Tahap akhir berupa magang di empat wilayah FKUB memberikan pengalaman nyata dalam melakukan asesmen kebutuhan, menggali data, menganalisis dinamika konflik, serta menyusun rekomendasi berbasis data lapangan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang integratif antara teori dan praktik mampu meningkatkan kesiapan mahasiswa sebagai mediator resolusi konflik. Mahasiswa tidak hanya memahami konflik dari sudut pandang akademik, tetapi juga menunjukkan kapasitas intervensi sosial. Program ini menjadi model kolaboratif yang potensial antara institusi pendidikan tinggi, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif.

Dengan demikian, sebagai rekomendasi konstruktif berupa 1) Pengembangan Kurikulum Praktik Resolusi Konflik. Agar Program Studi Agama-Agama mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan praktik resolusi konflik secara lebih sistematis dalam bentuk mata kuliah praktik lapangan, pelatihan berbasis kasus, atau studi komunitas. 2) Kemitraan Berkelanjutan dengan FKUB dan Lembaga Sosial Keagamaan. Kerja sama dengan FKUB dapat diperkuat sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar langsung dari dinamika konflik dan praktik resolusi berbasis komunitas.

Batasan dan Kajian Mendatang

Kajian ini memiliki batasan pada aspek temporal dan geografis, mengingat pelatihan dan magang hanya berlangsung dalam jangka waktu terbatas serta berfokus pada empat wilayah FKUB di Provinsi Lampung. Selain itu, penilaian terhadap efektivitas pelatihan masih bersifat deskriptif dan belum mencakup pengukuran longitudinal terhadap perubahan sikap dan perilaku peserta dalam jangka panjang. Kajian mendatang disarankan untuk mengembangkan model

evaluasi berbasis kuantitatif dan kualitatif guna mengukur dampak pelatihan terhadap kompetensi resolusi konflik secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan wilayah serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti tokoh agama lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, guna menguji keberlanjutan dan replikasi program dalam konteks yang lebih beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada lembaga mitra (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, PT. Finsya) yang terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan pelatihan berbasis kompetensi

Daftar Pustaka

- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*.
- Girivirya, S., Imran, A., Hidayat, B. A., Mashuri, S., Reslawati, & Fakhurrrazi. (2022). Moderation Religion in the Era Society 5.0 and Multicultural Society : Studies Based on Legal, Religious, and Social Reviews. *Linguistics and Culture Review*, 6(1. Special Issue On Social Sciences And Humanities (SSH)), 180–193. <http://www.lingcure.org/index.php/journal/article/view/2106>
- Joseph S. Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Natalia, L. (2018). Konflik dan integrasi sosial antarumat beragama: studi kasus pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya. In *Skripsi*.
- Pedersen, L. (2016). Religious Pluralism in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 387–398. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1218534>
- Rahmelia, S. (2021). Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Narasi Konflik Beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1288>
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Sulistyaningsih, T., Suprpto, Saiman, & Afandi, A. H. (2020). Integrative Social Movements in Maintaining Sustainable Environmental Development in East Java. *Atlantis Press: 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 436, 75–79. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.016>
- Suprpto. (2018). Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Inkostitusional. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12(2), 143–160. <https://doi.org/10.24815/jsu>
- Suprpto, Lidiawati, Pradana, M. Y. A., & Maksum, A. (2021). The Role and Thought of The Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah On Humanity. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 5(2), 91–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/isjoust.v5i2.4800>
- Suprpto, S. (2022). Learning Islam in a Moderate Way: How Pesantren Teaches Islamic Values and Nationhood Toward Santri? *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 153–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2556>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>